

BAHAN AJAR
LATIHAN DASAR CPNS GOL III ANGKATAN XXVII TAHUN 2019
ANALISIS ISU KONTEMPORER
Ir. Sri Sayekti, MSc
(Widyaiswara Ahli Madya, Pusdiklat-BPS)

A. Pendahuluan

Calon Pegawai Negeri Sipil dituntut kepeduliannya dalam mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan alam negeri Indonesia dan sumber daya manusia yang dimiliki merupakan modal bangsa untuk mengikuti perubahan dunia yang terus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer oleh para CPNS diharapkan dapat mewujudkan aktualisasi jiwa dan semangat para bela negara dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

B. Analisis Isu Kontemporer

Analisis Isu Kontemporer, sebagai disiplin ilmu tersendiri, yang menggunakan berbagai macam tehnik dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan memecahkan masalah-masalah terkini, actual dan problematik.

Tujuan dari analisis isu kontemporer adalah memberikan informasi kepada pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa dan negara. Di samping itu, analisis isu kontemporer juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman negara dan bangsa

Aplikasi analisis isu kontemporer meliputi wilayah permasalahan yang sangat luas, misalnya energi, pendidikan, hubungan internasional, kriminalitas, kesejahteraan masyarakat, pengangguran, transportasi, lingkungan hidup, kemiskinan, narkoba, radikalisme dan terorisme, korupsi dan money laundry, serta stabilitas keamanan lainnya.

C. Isu isu kontemporer

a. Kemiskinan

BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999 ANDRI DONNAL PUTERA Kompas.com - 16/07/2018, 13:07 WIB Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto bersama jajarannya saat menyampaikan rilis ekspor impor dan data lainnya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018).(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni

sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. "Maret 2018 untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. Kalau dilihat sebelumnya, biasanya 2 digit, jadi ini memang pertama kali dan terendah," kata Kepala BPS Suhariyanto saat menggelar konferensi pers di kantornya, Senin (16/7/2018). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Baca juga: Pemerintah Perlu Terobosan Atasi Ketimpangan Daerah Bila dirinci lagi, terdapat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan per Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun dibandingkan September 2017 sebesar 7,26 persen. Sama halnya dengan di perdesaan, di mana persentasenya pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun dari posisi September 2017 sebesar 13,47 persen. Suhariyanto mengungkapkan, sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dari September 2017 hingga Maret 2018 adalah inflasi umum dalam periode itu sebesar 1,92 persen serta rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan untuk rumah tangga di 40 persen lapisan terbawah yang tumbuh 3,06 persen. Baca juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 2019, Sinyal Ekonomi Indonesia Membaik Faktor lain yaitu bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6 persen pada kuartal I 2018 atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Selain itu, juga dari program beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan non-tunai kuartal I yang tersalurkan sesuai jadwal. "Lalu karena nilai tukar petani Maret 2018 di atas angka 100, yaitu 101,94, dan kenaikan harga beras sebesar 8,57 persen pada September 2017 sampai Maret 2018 yang disinyalir mengakibatkan penurunan kemiskinan jadi tidak secepat periode Maret 2017 sampai September 2017," kata dia. Kemiskinan tertinggi Jika ditarik mundur, pada 1999 Indonesia mencatat persentase kemiskinan paling tinggi, sebesar 23,43 persen atau setara dengan 47,97 juta penduduk miskin. Angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap menurun meski sempat beberapa kali naik pada periode tertentu. "Tetapi, menurut saya, kita masih punya banyak PR, bagaimana supaya kebijakan-kebijakannya lebih tepat sasaran sehingga penurunan kemiskinannya menjadi lebih tepat," ujar Suhariyanto.

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-ersentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999) dengan judul "BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-ersentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>.

Penulis : Andri Donnal Putera

Editor : Kurniasih Budi

b. Terorisme/Radikalisme

Soal Radikalisme dan Terorisme di Kampus, Pemerintah Akan Buat Regulasi Baru
FABIAN JANUARIUS KUWADO Kompas.com - 07/06/2018, 11:27 WIB Presiden Joko Widodo saat meninjau penggilingan gabah di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (Fabian Januarius Kuwado) INDRAMAYU, KOMPAS.com - Pemerintah sedang mengkaji urgensi aturan baru untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik di Indonesia. "Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti ya," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/6/2018). "Kalau regulasi semacam itu memang diperlukan, akan kami buat. Tapi ini masih dalam kajiannya Kemenristekdikti," lanjut dia. Apabila kajian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi merekomendasikan mesti ada aturan, Jokowi memastikan, regulasi itu tidak akan mengganggu kebebasan akademik. Baca juga: Radikalisme di Kampus, Jokowi Tekankan Kerja Sama dengan Ormas Islam "Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik, antara kebebasan berserikat, dengan proses pencegahan radikalisme dan terorisme," ujar Jokowi. "Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lain-lainnya," lanjut dia. Meski masih menunggu keputusan terkait aturan baru itu, Presiden Jokowi memastikan, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk meminimalisasi radikalisme dan terorisme di lingkungan akademik. Salah satunya, yakni dengan tidak hanya melibatkan lembaga negara, semisal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Polri atau TNI dalam upaya itu, namun juga melibatkan organisasi masyarakat. "Proses-proses deradikalisasi sekarang mulai kita gerakkan tidak hanya di pemerintah. Misalnya di BNPT untuk pencegahan atau tindakan. Kemudian di Polri dan TNI. Tetapi yang paling penting, misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama," ujar Jokowi. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima Presiden Jokowi, angka pelajar di segala jenjang pendidikan yang terpapar ideologi radikalisme dan terorisme di Indonesia cukup besar. Apalagi, masih berdasarkan laporan yang sama, keberadaan ideologi terorisme dan radikalisme di lingkungan akademik bukan tiba-terjadi. Hal itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Baca juga: Wapres Minta Kampus Beri Pemahaman Antiradikalisme untuk Mahasiswa "Radikalisme ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ini sudah proses lama dan tidak mendadak atau ujug-ujug gitu datang, kan tidak," ujar Jokowi. Maka diperlukan upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk menyetop perkembangan aktivitas kelompok tersebut. Video Pilihan Rektor dan Universitas Bertanggung Jawab Cegah Radikalisme "Memang kalau melihat data yang terpapar (ideologi radikalisme

dan terorisme) itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan dan proses pencegahan adalah yang lebih baik daripada kita menyelesaikan kalau sudah terjadi," lanjut Jokowi. Apa yang menyebabkan lingkungan akademis terutama mahasiswa maupun kalangan akademis terjerumus dalam tindak paham ekstrem ini?(Kompas TV) Penulis Fabian Januarius Kuwado Editor Krisiandi

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/11275781/soal-radikalisme-dan-terorisme-di-kampus-pemerintah-akan-buat-regulasi-baru) dengan judul "Soal Radikalisme dan Terorisme di Kampus, Pemerintah Akan Buat Regulasi Baru", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/11275781/soal-radikalisme-dan-terorisme-di-kampus-pemerintah-akan-buat-regulasi-baru>.

Penulis : Fabian Januarius Kuwado

Editor : Krisiandi

c. Proxywar

Yang Lebih Berbahaya dari "Proxy War"... ESTU SURYOWATI Kompas.com - 14/06/2017, 08:03 WIB Diskusi publik yang mengusung tema Pancasila, Terorisme, dan Proxy War, Jakarta, Selasa (13/6/2017). (KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI) JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat intelijen Stepi Anriani mengatakan, proxy war memang berbahaya, sebab tidak dilakukan secara langsung oleh negara yang terlibat di dalamnya. "Kita belakangan didengung-dengungkan dengan istilah proxy war, setelah Panglima TNI dalam berbagai pidato menyebut proxy war. Apa itu proxy war, (adalah) peperangan dengan menggunakan pihak ketiga," kata Stepi dalam diskusi "Pancasila, Terorisme, dan Proxy War" di Jakarta, Selasa (13/6/2017). Stepi mengatakan, peperangan jenis ini bukan hanya dimainkan oleh aktor negara (state actor), melainkan juga non-state actor. Aktornya bisa lembaga internasional, lembaga bantuan, non government organization, hingga institusi pers. Lebih lanjut Stepi mengatakan, di samping proxy war, ada bentuk peperangan lain yang dikenal dengan istilah asymmetric warfare dan cyber warfare. Peperangan asimetris atau (asymmetric warfare) merupakan pertempuran dua pihak atau lebih untuk menguasai aset dan sumber daya, yang juga dilakukan dengan penguasaan nonmiliter atau cara lazim perang dilakukan. Sedangkan cyber warfare merupakan peperangan yang dilakukan untuk menguasai potensi aset di dunia maya. Menurut Stepi, jika tiga bentuk peperangan itu dilakukan bersamaan (proxy war, asymmetric warfare, cyber warfare), maka akan menjadi peperangan yang mengerikan. "Jika ketiga elemen perang ini bersatu, maka itulah yang disebut hybrid warfare. Inilah peperangan yang lebih mematikan abad ini," kata Stepi. (Baca juga: "Proxy War" Dinilai Ancaman Terbaru Indonesia pada Masa Depan) Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan, saat ini proxy war

mengancam Indonesia. Sehingga semua pihak harus bersatu dalam mencegah dan melawannya. Dia mengatakan, dalam proxy war tidak bisa dilihat siapa lawan dan kawan, tetapi perang tersebut dikendalikan oleh negara lain. Ia menjelaskan, perang tanpa bentuk tersebut sudah terbukti, dengan kasus lepasnya Timor Timur dari NKRI. Timor Timur diperebutkan oleh negara lain, karena di sana ada kekayaan SDA berupa greater sunrise yang letaknya antara Indonesia dan Timor-Timur. Menurut dia, ada beberapa cara dalam mengatasinya, yakni modal NKRI yang mempunyai geografi daratan dan lautan yang kaya akan SDA agar dikelola dengan baik dan bermanfaat. Video Pilihan "Kemudian kita punya demografi, yakni kearifan lokal, yang juga harus dibarengi dengan revolusi mental, Pancasila sebagai pedoman hidup, serta dibutuhkan peran civitas dan akademika, serta mahasiswa dalam mencegahnya perang tanpa bentuk tersebut," kata Gatot. (Baca:Panglima TNI: "Proxy War" Mengancam Indonesia)
PenulisEstu Suryowati EditorBayu Galih

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yang Lebih Berbahaya dari "Proxy War"...", <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/08030021/yang.lebih.berbahaya.dari.proxy.war.>

Penulis : Estu Suryowati